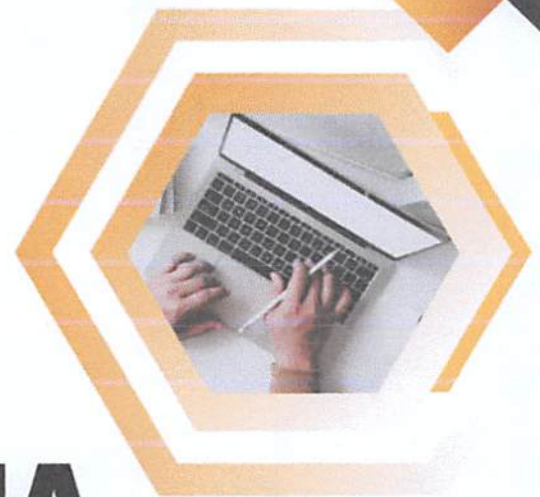




Pemerintahan Kabupaten Gresik
Kecamatan Sidayu



PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2025

KECAMATAN SIDAYU



Kantor Kecamatan Sidayu
Jl. Pahlawan No. 55 Sidayu Gresik



KATA PENGANTAR

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik Tahun 2025 adalah dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun dengan berpedoman kepada Rencana Strategis Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik Tahun 2021 – 2026 serta Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang menjadi tanggung Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik.

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik Tahun 2025 tersebut merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahun pertama pelaksanaan Rencana Strategis Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik Tahun 2021 – 2026, menjadi bahan materi Muyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten Gresik guna menyusun dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025, serta menjadi acuan dan pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik Tahun 2025 dan Rancangan APBD Kabupaten Gresik Tahun 2025.

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik Tahun 2025 memuat Kebijakan, Program, dan Kegiatan Pembangunan yang direncanakan pada Tahun 2025 berdasarkan hasil Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah (Forum SKPD) Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik.

Sistematika penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik Tahun 2025 ini mengakomodasi amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Dengan disusunnya Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik Tahun 2025 semoga dapat diimplementasikan sebaik-baiknya dalam menyusun perencanaan pembangunan tahunan daerah.

Kepada semua pihak yang telah berperan dalam penyusunan dokumen rencana kerja ini disampaikan terima kasih. Namun demikian berbagai upaya korektif bagi penyempurnaan Rencana Kerja Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik pada masa mendatang senantiasa diharapkan dari semua pihak.

Sidayu, 25 Juli 2025

CAMAT SIDAYU



SUWARTONO, AP., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19721116 199311 1 002

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	v
Hal	
BAB I : PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	4
1.4. Sistematika Penulisan	5
BAB II : HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN SIDAYU TAHUN 2025	
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Triwulan II Tahun 2025 dan Capaian Renstra	6
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan	12
2.3. Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD	13
2.4. Review terhadap Rancangan Awal SKPD	15
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	26
BAB III : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah	27
BAB IV : PENUTUP	36

DAFTAR TABEL

- Tabel 2.1 : Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Triwulan II Tahun 2025 dan tingkat capaian Rencana Strategis Kecamatan Sidayu
- Tabel 2.2 : Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Sidayu
- Tabel 2.3 : Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025
- Tabel 2.4 : Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2025
- Tabel 4.1 : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2025 Kecamatan Sidayu



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang merupakan penjabaran yang telah direncanakan didalam Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik Tahun 2021 – 2026. dan penyusunannya berpedoman pada Rancangan Renstra Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik Tahun 2025 serta Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gresik Tahun 2025 sesuai dengan tugas dan fungsi yang menjadi tanggung jawab Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik.

Sebagai dokumen perencanaan tahunan, Renja Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik Tahun 2025 memuat tujuan, sasaran, kebijakan, uraian program dan kegiatan Tahun 2025, spektrum pembiayaan, sebagai alat untuk mengimplementasikan pelaksanaan program meliputi pendanaannya yang terkait dengan APBD Kabupaten Gresik melalui RKA dan DPA.

Sebagai dokumen perencanaan tahunan, Rencana Kerja Kecamatan Sidayu tersebut merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahun kelima pelaksanaan Rencana Strategis. Proses penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Sidayu didasarkan pada penjangkaran aspirasi yang secara formal diformulasikan melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan sebagaimana diamanatkan pada Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara

Republik Indonesia Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Sidayu yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan prioritas pembangunan yang direncanakan pada tahun 2025 dengan maksud untuk memberikan landasan dan pedoman bagi semua pelaku pembangunan dalam melaksanakan tugas sebagai manifestasi kegiatan pembangunan di Kecamatan Sidayu. Dengan demikian dokumen ini akan bermanfaat bagi Kecamatan dalam rangka untuk mewujudkan keterpaduan dan mensinergikan serta mewujudkan tujuan Kecamatan Sidayu, pembiayaan pembangunan dari berbagai sumber misalnya APBD dan swadaya masyarakat, oleh karena itu program-program pembangunan yang akan direncanakan harus tertuang dalam Rencana Kerja Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik Tahun 2025.

1.2. Landasan Hukum

Adapun ketentuan peraturan perundangan sebagai landasan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Sidayu tahun 2025, antara lain meliputi :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4287);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tatacara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tatacara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Perubahan Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1312);
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Gresik;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gresik;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 11 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005 – 2025;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 10 tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2025;
16. Peraturan Bupati Gresik Nomor 75 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2024;
17. Peraturan Bupati Gresik Nomor 70 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2025.

1.3. Maksud dan Tujuan

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik Tahun 2025 disusun dengan maksud sebagai bahan / masukan bagi penyusunan RKPD Kabupaten Gresik Tahun 2025. Pembahasan RKPD Kabupaten Gresik Tahun 2025 dilakukan melalui Musrenbang Kabupaten. Selanjutnya, RKPD Kabupaten Gresik Tahun 2025 hasil Musrenbang tersebut sebagai bahan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran (PPA) serta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Gresik Tahun 2025.

Adapun tujuan penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik Tahun 2025 ini adalah sebagai bahan penyusunan RKPD Kabupaten Gresik Tahun 2025 dan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik Tahun

2025, sehingga terjadi konsistensi antara perencanaan dan penganggaran.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2025

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Triwulan II Tahun 2025 dan Capaian Renstra
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

BAB IV. PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN SIDAYU TAHUN 2025

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Triwulan II Tahun 2025 Dan Capaian Renstra Kecamatan Sidayu

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik Tahun 2025 dijadikan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) untuk ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik Tahun 2025. Program dan kegiatan yang direncanakan dalam Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik Tahun 2025, dilaksanakan seperti yang termuat dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan diperbarui dengan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik Tahun 2025.

Berdasarkan pelaksanaan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik Tahun 2024, dilaksanakan sebanyak 5 program dan 14 kegiatan dan 33 sub kegiatan. Tahun 2025, berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik Tahun 2025, dilaksanakan sebanyak 5 program dan 12 kegiatan serta 33 Sub Kegiatan.

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Triwulan II Tahun 2025 dan tingkat capaian Rencana Strategis dapat dilihat pada Tabel 2.1. Capaian kinerja tahun 2024 dan prakiraan capaian kinerja tahun 2025 tersebut, dijadikan acuan untuk menentukan target kinerja program dan kegiatan pada tahun 2025, agar target capaian indikator sampai dengan tahun terakhir Rencana Strategis (tahun 2026) dapat tercapai.

Tabel 2.1. (LRI)
 Evaluasi Terintegrasi Hasil Rencana Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten Gresik
 Rencana Perangkat Daerah OPD Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik
 Periode Pelaksanaan : Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2023

Sasaran RAKPD yang akan dicapai dalam Rencana PD : Meningkatkan kualitas pelayanan publik di tingkat Kecamatan

No.	KODE	Sistem	Garis Bidang Urusan Pemerintahan Daerah & Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sistem	Target Rencana Perangkat Daerah pada Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja Rencana Perangkat Daerah sampai dengan 2024	Target Kinerja dan Anggaran Rencana Perangkat Daerah Tahun 2025	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Rencana Perangkat Daerah yang direalisasi (2023)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Rencana SKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Rencana Perangkat Daerah s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Rencana Perangkat Daerah s.d Tahun 2024 (%)		Ush SKPD Penanggungjawab	KKT.					
						K	Rp.			K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.		K	Rp.			K	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16-18-19-20-21	22-23-24-25	26-27-28	29-30-31	32-33-34	35-36-37	38	39				
			URUSAN KEWILAYAHAN																							
	7.01.01	Meningkatnya Indeks pelayanan publik di tingkat Kecamatan	PROGRAM PENUJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN	perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program (17P)		100	25.851.213,889	92,32	5.651.339,115	100	5.146.357.645,50	15,79	811,513,374,12	13,84	711.406,411,84	0,00	8,80	29,45	1.522,913,785,96	29,43	29,43	121	5.174.372,961,86	122	28,67	
	7.01.01.2.01		Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			100	21.773.469,343	95	5.106.482,634	100	4.814.296,419,50	15,91	766.896,774,12	14,22	684.584,911,24	-	-	30,13	1.476,591,685,96	30,13	30,13	45	4.601,874,322	45	21,18	
	7.01.01.2.01.0001		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah buku rencana kerja SKPD (2021-2022)	buku	3	5.000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0,00	-	-		
				Jumlah buku rencana kerja SKPD (2023-2024)	dokumen	5	29.000,000	1,00	2.159,839	1	1.799,800	-	-	-	-	-	-	0,00	1	2.159,839	20	7,45	-	-		
	7.01.01.2.01.0002		Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA (2021-2022)	buku	10	5.000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0,00	-	-		
				Jumlah Dokumen RKA (2023-2024)	dokumen	4	24.320,500	1,00	2.999,839	1	1.799,800	-	-	-	-	-	-	0,00	1	2.999,839	25	12,33	-	-		
	7.01.01.2.01.0003		Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD (2021-2022)	buku	10	5.000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0,00	-	-		
				Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD (2023-2024)	dokumen	4	24.320,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0,00	-	-		
	7.01.01.2.01.0004		Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen DPA SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD (2021-2022)	buku	17	5.000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0,00	-	-		
				Jumlah Dokumen DPA SKPD (2023-2024)	dokumen	4	24.320,500	1,00	2.999,839	1	1.799,800	-	-	-	-	-	0,00	1	2.999,839	25	12,33	-	-	-		
	7.01.01.2.01.0005		Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD (2021-2022)	buku	13	5.000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0,00	-	-		
				Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD (2023-2024)	dokumen	4	24.320,500	1,00	2.159,839	1	1.799,800	-	1,80	599,800	-	1,00	599,800	100,00	22,32	2	2.799,639	50	11,35	-		
	7.01.01.2.01.0006		Koordinasi & Penyusunan Laporan Capaian Kinerja & Indikator Realisasi Kinerja OPD	Jumlah tercapainya laporan kinerja dan indikator realisasi (2021-2022)	laporan	10	5.000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0,00	-	-		
				Jumlah tercapainya laporan kinerja dan indikator realisasi (2023-2024)	laporan	48	29.000,000	6	2.159,839	12	1.799,800	-	-	-	-	-	-	0,00	6	2.159,839	13	7,45	-	-		
	7.01.01.2.01.0007		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Kinerja yang Dihasilkan (2021-2022)	laporan	2	5.000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0,00	-	-		
				Jumlah Laporan Kinerja yang Dihasilkan (2023-2024)	laporan	8	24.320,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0,00	-	-		
	7.01.01.2.02		Aktivitas/realisasi Kegiatan Perangkat Daerah			12	18.588.353,884	12	2.694.983,191	12	4.280.015,491,51	5	684.811,346,12	1	604.228,963,54	-	-	9	1.239.345,509,96	58,08	38,32	18	3.894.243,791	150	21,21	Subbag UP
	7.01.01.2.02.0001		Penyusunan pjd dan targetan ASN	Jumlah ASN yg memenuhi pjd & targetan (2021-2022)	orang	24	4.999.691,721	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0,00	-	-		
				Jumlah ASN yg memenuhi pjd & targetan (2023-2024)	orang/bulan	24	13.320.630,515	24	2.802.743,232,18	25	4.378.215,693,51	25	684.811,346,12	25	604.228,963,54	-	25	1.208.345,509,96	100,00	30,14	49	3.892,083,862	204	29,22		
	7.01.01.2.02.0002		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Abdi Tahun	Jumlah Laporan/Revisi Keuangan Abdi Tahun (2021-2022)	buku	1	5.000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0,00	-	-		
				Jumlah Laporan/Revisi Keuangan Abdi Tahun (2023-2024)	laporan	4	23.025,500	1,00	2.159,839	1	1.799,800	-	-	-	-	-	-	0,00	1	2.159,839	25	8,63	-	-		

		Koordinat dan penyusunan laporan keuangan bulanan, triwulanan, semesteran SKPD (2021-2022)	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan, Triwulanan, Semesteran SKPD (2021-2022)	laporan	3	3,000,000													0	-	0.00				
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan, Triwulanan, Semesteran SKPD (2023-2024)	laporan	72	11,613,200	-	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	0.00			
7.01.01.2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Peserta Pendidikan Administrasi Kepegawaian Aparatur di Kecamatan	orang	156	53,671,000	66	45,177,690	25	5,917,230	0	-	0	-	0	-	35	-	140.00	6.00	101	45,177,690	65	172.81	Subbag UP
7.01.01.2.01.0009		Pendidikan & Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas & Fungsi	Jumlah peserta yang mengikuti pendidikan (2021-2022)	orang	32	19,763,700	31	11,976,900											31		11,976,900	96.88	297.87		
			Jumlah peserta yang mengikuti pendidikan (2022-2023)	orang	124	34,283,300	35	9,220,780	25	5,917,230	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	35	9,220,780	28	36.89		
7.01.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah fasilitas pendukung pelaksanaan Tugas Pokok Perangkat Daerah	fasilitas	12	748,176,902	12	93,889,538	12	126,439,600	-	-	11.43	14,449,900	-	-	11.43	14,449,900	95.25	11.43	23	107,538,738	190	14.37	Subbag UP
7.01.01.2.06.0001		Penyediaan komputer termasuk suku/persediaan barang kantor	Jumlah belanja Komputer Lantai (2021-2022)	buah	54	3,000,000													0	-	0.00				
			Jumlah belanja Komputer Lantai (2023-2024)	paket	4	32,961,300	1	10,219,858	1	5,124,900		1.00	1,306,100		1	1,306,100	100.00	25.49	2		11,564,958	50	31.09		
7.01.01.2.06.0002		Penyediaan Peralatan & Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang terdida (2021-2022)	jenis	198	112,391,421													0	-	0.00				
			Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang terdida (2022-2023)	paket	32	109,564,000	8	44,500,218	6	22,618,400		2.00	4,935,000		2	4,935,000	33.33	21.91	10		49,515,218	31	47.61		
7.01.01.2.06.0004		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah logistik kantor yg diberikan dalam dan tahun (2021-2022)	logistik	36	24,219,000	-	-											0	-	0.00				
			Jumlah logistik kantor yg diberikan dalam dan tahun (2023-2024)	paket	76	55,818,038	19	4,380,480	2	3,353,300		1	825,500		1	825,500	50.00	34.61	20		5,205,900	26	9.33		
7.01.01.2.06.0005		Penyediaan Barang Cetakan & Pengiriman	Jumlah barang cetakan dan pengiriman (2021-2022)	jenis	4	16,380,976	-	-											0	-	0.00				
			Jumlah barang cetakan dan pengiriman (2023-2024)	paket	16	12,519,287	4	7,496,900	3	5,553,100		1	1,002,000		1	1,002,000	33.33	16.83	5		8,498,900	31	16.18		
7.01.01.2.06.0006		Penyediaan Bahan Swast & Peralatan Penyediaan-sediaan	Jumlah bahan swast (2021-2022)	jenis	2	3,600,000													0	-	0.00				
			Jumlah bahan swast (2023-2024)	dokumen	49	8,035,380	12	1,458,000	1	916,000		-	-	-	-	-	-	0.00	12		1,458,000	25	18.14		
7.01.01.2.06.0007		Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Materi/Bahan cek (2021-2022)	lembar	300	32,784,600													0	-	0.00				
			Jumlah Materi/Bahan cek (2023-2024)	paket	4	26,784,600	607	6,070,000	1	2,989,000		1	756,400		1	756,400	100.00	25.31	608		6,826,400	17,300	25.49		
7.01.01.2.06.0009		Penyediaan Rupa Kewilad & Kecamatan	Jumlah pelayanan rupa kewilad & kecamatan (2021-2022)	fasilitas	24	39,000,000													0	-	0.00				
			Jumlah pelayanan rupa kewilad & kecamatan (2023-2024)	laporan	48	44,641,000	12	10,320,000	12	60,469,100		3.00	3,600,000		3	3,600,000	25.00	5.95	15		13,920,000	31	31.18		
7.01.01.2.06.0011		Dokumen Pelaksanaan Sistem Pencatatan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah dokumen dokumen pelaksanaan sistem PER pada SKPD (2024-2024)	dokumen	5	187,487,000	1	8,544,462	1	24,595,200		1.00	2,004,900		1	2,004,900	100.00	8.02							
7.01.01.2.7		Pengadaan Barang MBB Daerah Pemangku Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang MBB Daerah Kecamatan Sidaman	jenis	30	287,846,000	4	-											4		-	13		Subbag UP	
7.01.01.2.7.1		Pengadaan Mobil	Jumlah belanja pengadaan mobil kantor (2021-2022)	jenis	1	30,000,000	-	-											0	-	0.00				

[illegible]

		Pembangunan & Desa	Jumlah Lembaga Komunitas yang berpartisipasi dalam forum Musyawarah(2023-2024)	Lembaga	28	201,000,000	7	71,516,500	7	16,510,300	7.07	33,231,600	-					7	33,231,600	100.00	51.81	14	108,548,100	50	52.10				
7.01.03.1.01.02		Indikator Program Kerja dan Kegiatan Pembangunan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Inisiator KEPDes (2021-2022)	Inisiator	21	15,000,000															0	-	0.00	-		Sedat Rendah			
7.01.03.1.01.03		Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pembangunan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pembinaan Korpri, Pondera (2021-2022)	Kepri	45	152,760,989															0	-	0.00	-		Sedat Rendah			
			Jumlah laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pembangunan Masyarakat (2023-2024)	Laporan	92	327,000,000	23	60,279,300	3	27,259,600	-								-	-	0.00	23	60,279,300	23	18.43				
7.01.03.1.01		Pembangunan Lembaga Komunitas Tingkat Kecamatan			100	1,111,130,940	100	119,625,282	100	71,283,800		15,278,500	0		0	-		15,278,500	-	21.42	100	134,885,782	100	12.13					
7.01.03.1.03.01		Pembangunan Lembaga Komunitas	Jumlah Lembaga Komunitas yang Didana (2021-2022)	Lembaga	10	294,632,940															0	-	0.00	-		Sedat Rendah			
			Jumlah Lembaga Komunitas yang Didana (2023-2024)	Lembaga	20	817,190,000	5	119,625,282	5	71,283,800		11,270,500	2		2		11,270,500	40.00	21.42	7	131,891,782	35	16.50						
Rata - rata capaian kinerja (%)																									25.29	25.19		128.29	17.31
Predikat Kinerja																									Sangat Rendah	Sangat Rendah		Sangat Tinggi	Sangat Rendah
7.01.04		PROGRAM KOORDINASI KEBERTRAMAN & KEBERTRAMAN UMUM			100	627,980,000	100	99,818,791	100	83,479,326	14.61	12,195,800	4.87	4,065,000	-	-	-	19.48	16,368,000	19.48	19.48	119	116,076,791	119	18.48				
7.01.04.1.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Pemerintahan & Pemerintahan Umum		Inisiator	12	491,599,923	12	77,848,740	12	68,189,976	5	12,195,800	5	4,065,000	-	-	-	6	16,368,000	50.00	13.35	18	87,188,740	158.00	18.13				
7.01.04.1.01.01		Geografi dengan Ekspedisi Negara RI, TNI & Instansi Vertikal & Wilayah Kecamatan	Jumlah peserta pendirian Lisma desa se kec. (2021-2022)	orang	50	118,809,000															0	-	0.00	-		Kec. Tinggi			
			Jumlah laporan hasil Geografi dengan Ekspedisi Negara RI, TNI & Instansi Vertikal	Laporan	48	292,475,667	12	45,918,745	12	48,842,800	5	12,195,800	3	4,065,000				9	16,368,000	50.00	33.29	18	61,176,743	38	21.26				
7.01.04.1.01.02		Homogenisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Kemitraan Kegiatan Ekspedisi yang di Fundasi (2021-2022)	orang	28	10,000,000															0	-	0.00	-		Kec. Tinggi			
			Jumlah laporan pelaksanaan Homogenisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (2023-2024)	Laporan	48	70,314,156	12	26,929,997	2	19,347,576			-				12	-	600.00	0.00	24	28,929,997	50	30.30					
7.01.04.1.01		Koordinasi Peningkatan & Penguatan Pemerintahan Daerah & Pemerintahan Kepala Daerah	Peningkatan pelayanan yang tertanggung	person	100	136,381,877	100	26,970,051	11.21	15,288,850		-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	100	26,970,051	100.00	19.78				
7.01.04.1.02.01		Koordinasi / Sinergi dgn Perangkat Daerah yg Terges & Penguatan & Bidang Penguatan Pemerintahan Perantara dan/atau desentralisasi Kapasitas Negara RI	Jumlah koordinasi dan pelaksanaan kegiatan penguatan Perda dan Penguatan Kapasitas (2021-2022)	kal	8	35,060,000															0	-	0.00	-		Kec. Tinggi			
			Jumlah Laporan Koordinasi / Sinergi dgn Perangkat Daerah yg Terges & Penguatan & Bidang Penguatan Pemerintahan Perantara dan/atau desentralisasi Kapasitas Negara RI (2023-2024)	Laporan	32	101,321,877	8	26,970,051	2	15,288,850.00	-		-				-	-	-	0.00	8	26,970,051	25	26.62					
Rata - rata capaian kinerja (%)																									19.48	19.48		128.48	18.48
Predikat Kinerja																									Sangat Rendah	Sangat Rendah		Sangat Tinggi	Sangat Rendah
7.01.05		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				14,500,000															0	-		-					
7.01.05.1.01		Peningkatan Urusan Pemerintahan Umum secara Penguatan Kepala Daerah				14,500,000															0	-		-					

7.01.01.2.01.04	Pembinaan Kerjasama Antarlembaga dan Jejaring, Usah Berjangkauan, dan dan Organisasi Lainnya yang Mendukung Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional	Jumlah Peserta Pembinaan	perserta	480	14.508.000														0,00	0					0,00		
Rata-rata capaian kinerja (%)																											
Rata-rata capaian kinerja (%)																											
Rata-rata capaian kinerja (%)																											
7.01.06	PROGRAM PEMBIYAAAN & PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		perserta	100	532.136.493	100	95.118.234	100	48.537.308	-	-	11,83	7.560.000	-	-	-	11,83	7.560.000	11,83	11,83	111	102.678.294	111	19,29			
7.01.06.2.01	Fasilitas, Rekomendasi & Koordinasi Pemukiman & Pengembangan Pemukiman Desa		perserta	100	832.136.493	100	95.118.234	100	48.537.308	-	-	11,83	7.560.000	-	-	-	11,83	7.560.000	11,83	11,83	111	102.678.294	111,83	19,29			
7.01.06.2.01.01	Fasilitas Penyusunan/Pertanian Desa & Perawatan Kepala Desa	Jumlah Laporan Pertanian Desa (2021-2022)	bidak	41	36.872.000																9	-	0,00	-	Sekali Pernah ada		
		Jumlah dok. yg difasilitasi dan rangkai penyusunan Perencanaan Desa & Perawatan Kepala Desa (2023-2026)	dukumen	54	62.000.000	21	3.407.743	21	4.328.000												0,00	23	3.407.743	23	5,50		
7.01.06.2.01.02	Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang dibina (2021-2022)	desa	41	41.980.000																	0	-	0,00	-	Sekali Pernah ada	
		Jumlah dok. yg difasilitasi dan rangkai administrasi Tata Pemerintahan Desa (2023-2026)	dukumen	54	22.491.000	21	43.201.941	21	21.896.500				21	-	100,00	0,00	42	43.201.941					50	154,33			
7.01.06.2.01.03	Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa & Peningkatan Aspek Desa	Jumlah Desa yang difasilitasi pengkajian keuangan desa (2021-2022)	desa	41	40.009.993																	0	-	0,00	-	Sekali Pernah ada	
		Jumlah dok. yg difasilitasi dan rangkai Pengelolaan Keuangan Desa & Peningkatan Aspek Desa (2023-2026)	dukumen	54	67.212.000	21	3.279.394	21	3.060.000													0,00	21	3.279.394	23	4,88	
7.01.06.2.01.04	Fasilitas Pelaksanaan Tugas Kepala Desa & Perangkat Desa	Jumlah peserta pelatihan manajemen pemerintahan desa (2021-2022)	orang	212	63.367.500																	0	-	0,00	-	Sekali Pernah ada	
		Terdokumentasi Fasilitas Pelaksanaan Tugas Kepala Desa & Perangkat Desa (2023-2026)	dukumen	14	132.790.000	4	43.121.206	6	37.267.000			3	7.560.000			3	7.560.000	30,00	20,29	7			51.881.206	29	39,67		
7.01.06.2.01.11	Fasilitas Pelaksanaan Tugas, Fungsi & Kewajiban Lembaga Komunitas	Jumlah Lembaga Komunitas yang dibina	lembaga	3	15.000.000	-	-	-	-													0	-	0,00	-	Sekali Pernah ada	
		Fasilitas pelaksanaan Fasilitas Kepala Desa yang terdokumentasi	desa	21	15.000.000	-	-	-	-													0	-	0,00	-	Sekali Pernah ada	
7.01.06.2.01.16	Fasilitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Dalam Peningkatan Desa	Jumlah Pembinaan BPD (2021-2022)	bidak	4	15.156.000																	0	-	0,00	-	Sekali Pernah ada	
		Jumlah dok. Fasilitas dalam rangka pelaksanaan Tugas dan Fungsi BPD (2023-2026)	dukumen	4	15.156.000	-	-	-	-				0	0								0,00	0	-	-	0,00	
Rata-rata capaian kinerja (%)																											
Rata-rata capaian kinerja (%)																											
Rata-rata capaian kinerja (%)																											
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM																											
Rata-rata capaian kinerja (%)																											
Rata-rata capaian kinerja (%)																											
Rata-rata capaian kinerja (%)																											
Rata-rata capaian kinerja (%)																											
Rata-rata capaian kinerja (%)																											
Rata-rata capaian kinerja (%)																											
Rata-rata capaian kinerja (%)																											
Rata-rata capaian kinerja (%)																											
Rata-rata capaian kinerja (%)																											
Rata-rata capaian kinerja (%)																											
Rata-rata capaian kinerja (%)																											
Rata-rata capaian kinerja (%)																											
Rata-rata capaian kinerja (%)																											
Rata-rata capaian kinerja (%)																											
Rata-rata capaian kinerja (%)																											
Rata-rata capaian kinerja (%)																											
Rata-rata capaian kinerja (%)																											
Rata-rata capaian kinerja (%)																											
Rata-rata capaian kinerja (%)																											
Rata-rata capaian kinerja (%)																											
Rata-rata capaian kinerja (%)																											
Rata-rata capaian kinerja (%)																											
Rata-rata capaian kinerja (%)																											
Rata-rata capaian kinerja (%)																											
Rata-rata capaian kinerja (%)																											
Rata-rata capaian kinerja (%)																											
Rata-rata capaian kinerja (%)																											
Rata-rata capaian kinerja (%)																											
Rata-rata capaian kinerja (%)																											
Rata-rata capaian kinerja (%)																											
Rata-rata capaian kinerja (%)																											
Rata-rata capaian kinerja (%)																											
Rata-rata capaian kinerja (%)																											
Rata-rata capaian kinerja (%)																											
Rata-rata capaian kinerja (%)																											
Rata-rata capaian kinerja (%)																											
Rata-rata capaian kinerja (%)																											
Rata-rata capaian kinerja (%)																											
Rata-rata capaian kinerja (%)																											
Rata-rata capaian kinerja (%)																											
Rata-rata capaian kinerja (%)																											
Rata-rata capaian kinerja (%)																											
Rata-rata capaian kinerja (%)																											
Rata-rata capaian kinerja (%)																											
Rata-rata capaian kinerja (%)																											
Rata-rata capaian kinerja (%)																											
Rata-rata capaian kinerja (%)																											
Rata-rata capaian kinerja (%)																											
Rata-rata capaian kinerja (%)																											
Rata-rata capaian kinerja (%)																											
Rata-rata capaian kinerja (%)																											
Rata-rata capaian kinerja (%)																											
Rata-rata capaian kinerja (%)																											
Rata-rata capaian kinerja (%)																											
Rata-rata capaian kinerja (%)																											
Rata-rata capaian kinerja (%)																											
Rata-rata capaian kinerja (%)																											
Rata-rata capaian kinerja (%)																											
Rata-rata capaian kinerja (%)																											
Rata-rata capaian kinerja (%)																											
Rata-rata capaian kinerja (%)																											
Rata-rata capaian kinerja (%)																											
Rata-rata capaian kinerja (%)																											
Rata-rata capaian kinerja (%)																											
Rata-rata capaian kinerja (%)																											
Rata-rata capaian kinerja (%)																											
Rata-rata capaian kinerja (%)																											
Rata-rata capaian kinerja (%)																											
Rata-rata capaian kinerja (%)																											
Rata-rata capaian kinerja (%)																											
Rata-rata capaian kinerja (%)																											
Rata-rata capaian kinerja (%)																											
Rata-rata capaian kinerja (%)																											
Rata-rata capaian kinerja (%)																											
Rata-rata capaian kinerja (%)																											
Rata-rata capaian kinerja (%)																											
Rata-rata capaian kinerja (%)																											
Rata-rata capaian kinerja (%)																											
Rata-rata capaian kinerja (%)																											
Rata-rata capaian kinerja (%)																											
Rata-rata capaian kinerja (%)																											
Rata-rata capaian kinerja (%)																											
Rata-rata capaian kinerja (%)																											
Rata-rata capaian kinerja (%)																											
Rata-rata capaian kinerja (%)																											
Rata-rata capaian kinerja (%)																											
Rata-rata capaian kinerja (%)																											
Rata-rata capaian kinerja (%)																											
Rata-rata capaian kinerja (%)																											
Rata-rata capaian kinerja (%)																											
Rata-rata capaian kinerja (%)																											
Rata-rata capaian kinerja (%)																											
Rata-rata capaian kinerja (%)																											
Rata-rata capaian kinerja (%)																											
Rata-rata capaian kinerja (%)																											
Rata-rata capaian kinerja (%)																											

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan

Kantor Kecamatan Sidayu mempunyai tugas membantu Pemerintah Kabupaten Gresik dalam penyelenggaraan tugas umum pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang meliputi pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan, pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa, dan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa.

Pelayanan yang diberikan kepada masyarakat terutama dalam administrasi kependudukan antara lain KTP, KK dan Surat Pindah. Selain itu permintaan surat rekomendasi dan koordinasi dan fasilitasi kegiatan pemerintahan lainnya.

Kinerja Pelayanan Kantor Kecamatan Sidayu tahun 2024 dapat diukur melalui Survey Kepuasan Masyarakat (SKM). Untuk mengetahui SKM pelayanan pada Kantor Kecamatan Sidayu, tahun 2024 sudah dilakukan survey, hasilnya mendapat skor 98.87 % atau dalam kategori BAIK dan sudah melampaui target.

Hasil memuaskan SKM tidak terlepas dari penerapan standar pelayanan publik di Kantor Kecamatan Sidayu. Kinerja pelayanan didukung oleh system yang baik, petugas yang cakap, dan ditunjang sarana yang cukup. Pelayanan dapat selesai seperti standar waktu yang ditetapkan. Kecuali jika ada masalah diluar kendali, misal Pemadaman listrik dan komputer KK/KTP rusak.

Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja dan Pencapaian Perencanaan Strategis (Renstra) Kecamatan Sidayu s/d Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 2.2 sebagaimana berikut :

TABEL 2.2 (T-C. 30)
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN KECAMATAN SIDAYU
KABUPATEN GRESIK

No.	Indikator	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	11	12	13
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik di tingkat Kecamatan			86	88	98	98.25	97.12	98.87	98	98.25	

2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Identifikasi permasalahan Berdasarkan Tugas dan Pelayanan berdasarkan evaluasi kinerja pelayanan Kecamatan Sidayu selama 5 (lima) tahun yang lalu, mencermati tantangan dan peluang pelayanan, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Sidayu, maka beberapa permasalahan berdasarkan tugas dan pelayanan yang berkembang dan harus dihadapi Kecamatan Sidayu 5 (lima) tahun ke depan antara lain:

A. Makin tingginya tuntutan masyarakat dalam pelayanan publik maka langkah-langkah yang akan diambil :

1. Reformasi Birokrasi atau Penataan Sumber Daya Manusia

Dalam rangka pelayanan yang prima langkah strategis yang ditetapkan Kecamatan Sidayu adalah :

- Menyiapkan petugas pelayanan yang trampil
- Memberikan kesempatan petugas pelayanan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan
- Mendorong untuk bekerja yang profesional dengan memberikan penghargaan bagi petugas yang disiplin dan berprestasi serta memberikan sanksi bagi yang melanggar ketentuan.

2. Peningkatan Sarana dan Prasarana

Untuk menunjang pelayanan yang baik diperlukan sarana dan prasarana sebagai berikut :

- a. Menyediakan tempat pelayanan yang mudah didapat oleh pelanggan dan yang representatif.
 - b. Menyediakan papan informasi mengenai mekanisme atau tata cara dan prosedur pelayanan
 - c. Melengkapi perangkat dan peralatan yang canggih untuk mempermudah dan mempercepat pelayanan
 - d. Menyediakan pengaduan masyarakat, melalui media elektronik (Email, Telepon, Sosial Media, Kotak Saran Survey Kepuasan Masyarakat pada aplikasi Sukma E-Jatim, Whatsapp)
 - e. Menyediakan AC dalam ruang pelayanan masyarakat.
3. Upaya – upaya lain yang diperlukan
- a. Sosialisasi dan memberikan informasi kepada masyarakat setiap ada kegiatan dan pertemuan warga mengenai sistem pelayanan di Kecamatan Sidayu
 - b. Memberikan informasi dan penekanan kepada Kepala Desa melalui konferensi untuk melakukan langkah – langkah strategis dalam pelayanan di Tingkat Desa
 - c. Menyederhanakan prosedur pelayanan dengan tetap mengedepankan aturan yang telah ditetapkan
 - d. Menanggapi setiap ada pengaduan masyarakat 1 kali 24 jam untuk segera diselesaikan
- B. Makin tingginya tuntutan masyarakat dalam kewilayahan dan pembangunan maka langkah – langkah yang akan diambil :
1. Mendorong pemerintah desa dalam menjaring asosiasi masyarakat dalam rangka musyawarah pembangunan desa untuk melibatkan semua unsur masyarakat yang ada di desa
 2. Identifikasi terhadap infrastruktur yang ada untuk membandingkan dengan jumlah dan kebutuhan masyarakat yang diperlukan
 3. Bersama – sama masyarakat melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk menentukan dan menetapkan program prioritas pembangunan
- C. Manajemen pemerintahan di desa sebagai supervisi pembangunan maka langkah – langkah yang akan diambil :

1. Peningkatan sumber daya aparatur pemerintah desa dengan upaya melakukan pembinaan dan pelatihan secara berkala dan berkelanjutan.
2. Monitoring dan evaluasi dilakukan secara rutin dan koordinasi dengan pemerintah Kabupaten
3. Menindaklanjuti dan memperbaiki segala bentuk temuan oleh Inspektorat Kabupaten
4. Memberikan penghargaan kepada desa yang berprestasi dalam upaya peningkatan manajemen pemerintah desa

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan Awal Renja Kecamatan Sidayu disusun dari hasil Musrenbang Kecamatan dengan mengacu pada evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu dan dokumen pelaksanaan Renstra Kecamatan Sidayu tahun 2021-2026. Review terhadap rancangan awal RKPD dapat dilihat pada tabel 2.3 (T-C.31) berikut:

Tabel 2.3 (Tabel T-C.31)
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025
Kecamatan Sidayu

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian 2025	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					5,140,357,645.50					5,047,390,561.51	
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN	Kec. Sidayu	Persentase ketercapaian sasaran program OPD	100%	4,814,296,620	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN	Kec. Sidayu	Persentase ketercapaian sasaran program OPD	100%	4,758,859,662	
1	Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi	100%	8,999,000	Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi	4 dokumen	6,749,000	
1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah buku rencana kerja SKPD	1 dokumen	1,799,800	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah buku rencana kerja SKPD	1 dokumen	1,349,800	
1.2	Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD		Jumlah Dokumen RKA	1 dokumen	1,799,800	Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD		Jumlah Dokumen RKA	1 dokumen	1,349,800	
1.3	Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen DPA SKPD		Jumlah Dokumen DPA SKPD	1 dokumen	1,799,800	Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen DPA SKPD		Jumlah Dokumen DPA SKPD	1 dokumen	1,349,800	
1.4	Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	1,799,800	Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	1,349,800	
1.5	Koordinasi & Penyusunan Laporan Capaian Kinerja & Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD		Jumlah tersusunya laporan kinerja dan ikhtisar realisasi	12 laporan	1,799,800	Koordinasi & Penyusunan Laporan Capaian Kinerja & Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD		Jumlah tersusunya laporan kinerja dan ikhtisar realisasi	12 laporan	1,349,800	

2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Pelaporan Kinerja dan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 bulan	4,280,015,494	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Pelaporan Kinerja dan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 bulan	4,279,565,493.51
2.1	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN		Jumlah ASN yg menerima gaji & tunjangan	24 orang	4,278,215,693.51	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN		Jumlah ASN yg menerima gaji & tunjangan	24 orang	4,278,215,693.51
2.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun		Jumlah Laporan/Buku Keuangan Akhir Tahun	1 laporan	1,799,800	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun		Jumlah Laporan/Buku Keuangan Akhir Tahun	1 laporan	1,349,800
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah Peserta Pembinaan Administrasi Sumberdaya Aparatur di Kecamatan	25 orang	5,917,230	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah Peserta Pembinaan Administrasi Sumberdaya Aparatur di Kecamatan	25 orang	5,917,000
3.1	Pendidikan & Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas & Fungsi		Jumlah peserta yang mengikuti pembinaan	25 orang	5,917,230	Pendidikan & Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas & Fungsi		Jumlah peserta yang mengikuti pembinaan	25 orang	5,917,000
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah fasilitasi terhadap pelaksanaan Tupoksi Perangkat Daerah	12 bulan	126,419,600	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah fasilitasi terhadap pelaksanaan Tupoksi Perangkat Daerah	12 bulan	78,315,700
4.1	Penyediaan komponen instalansi listrik/penerangan bangunan kantor		Jumlah belanja Komponen Listrik	1 paket	5,124,900	Penyediaan komponen instalansi listrik/penerangan bangunan kantor		Jumlah belanja Komponen Listrik	1 paket	5,124,900
4.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 paket	22,618,400	Penyediaan Peralatan & Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 paket	22,584,200

4.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 paket	3,353,500	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 paket	3,353,500	
4.4	Penyediaan Barang Cetakan dan penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 paket	5,953,100	Penyediaan Barang Cetakan & Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 paket	4,121,400	
4.5	Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Perundang Undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	5 Dok.	916,000	Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	5 Dok.	916,000	
4.6	Penyediaan Bahan/Material		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 paket	2,989,000	Penyediaan Bahan/Material		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 paket	2,989,000	
4.7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 lap.	60,469,500	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi & Konsultasi		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 lap.	14,231,500	
4.8	Dukungan Pelaksanaan Sistem PBE pada SKPD		Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem PBE pada SKPD	1 dok.	24,995,200	Dukungan Pelaksanaan Sistem PBE pada SKPD		Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem PBE pada SKPD	1 dok.	24,995,200	
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah daerah		- Jumlah fasilitasi terhadap pelaksanaan Tupoksi Perangkat Daerah	12 bulan	338,802,900	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah daerah		- Jumlah fasilitasi terhadap pelaksanaan Tupoksi Perangkat Daerah	12 bulan	338,802,900	
			- Presentase petugas layanan yang memahami bahasa isyarat	100%				- Presentase petugas layanan yang memahami bahasa isyarat	100%		

6.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	42,656,400	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	42,656,400	
6.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	296,146,500	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	296,146,500	
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah fasilitas Pemeliharaan terhadap sarana prasarana Aparatur	12 bulan	54,142,396	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah fasilitas Pemeliharaan terhadap sarana prasarana Aparatur	12 bulan	49,509,568	
			- Ketersediaan parkir kendaraan penyandang disabilitas					- Ketersediaan parkir kendaraan penyandang disabilitas			
7.1	Pemeliharaan Peralatan & Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	5 Unit	35,604,028	Pemeliharaan Peralatan & Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	5 Unit	30,971,200	
7.2	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor & Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 unit	13,868,368	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor & Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 unit	13,868,368	
7.3	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7 unit	4,670,000	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7 unit	4,670,000	

II	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN & PELAYANAN PUBLIK		Tingkat Kematangan Pelayanan Publik	4	3,195,300	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN & PELAYANAN PUBLIK		Tingkat Kematangan Pelayanan Publik	4	3,195,300	
8	Penyelenggaraan Urusan Pemerintah yg tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yg ada di Kecamatan		Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	90	3,195,300	Penyelenggaraan Urusan Pemerintah yg tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yg ada di Kecamatan		Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	90	3,195,300	
8.1	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kec. Sidayu		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Lap.	3,195,300	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kec. Sidayu		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Lap.	3,195,300	
III	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA & KELURAHAN		Persentase RKPDes yang ditetapkan tepat waktu	100%	170,849,400	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA & KELURAHAN		Persentase RKPDes yang ditetapkan tepat waktu	100%	144,853,500	
			Persentase Musrenbang Kelurahan yang difasilitasi	100%				Persentase Musrenbang Kelurahan yang difasilitasi	100%		
			Persentase Pelaku Ekonomi di Wilayah Kecamatan yang difasilitasi	93%				Persentase Pelaku Ekonomi di Wilayah Kecamatan yang difasilitasi	93%		
			Persentase Lembaga Ekonomi Masyarakat yang difasilitasi	95%				Persentase Lembaga Ekonomi Masyarakat yang difasilitasi	95%		
			Persentase Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan yang dibina	93%				Persentase Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan yang dibina	93%		

9	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		Jumlah pelaksanaan koordinasi pemberdayaan desa	28 Keg	99,565,600	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		Jumlah pelaksanaan koordinasi pemberdayaan desa	28 Keg	81,675,700	
			Persentase perwakilan kelompok perempuan dan forum anak di Musrenbang Kecamatan	100%				Persentase perwakilan kelompok perempuan dan forum anak di Musrenbang Kecamatan	100%		
			Persentase desa yang memasukkan usulan perempuan dalam hasil Musrenbang Desa	100%				Persentase desa yang memasukkan usulan perempuan dalam hasil Musrenbang Desa	100%		
9.1	Penigkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	7 lembaga	56,510,900	Penigkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa	7 lembaga	51,096,400	
9.2	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan		Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	21 Dok.	15,795,100	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan		Jumlah buku RKPDes	21 Dok.	12,693,700	

9.3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	3 Lap.	27,259,600	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Jumlah Pembinaan Kopwan, Bumdes	3 Lap.	17,885,600	
10	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		Persentase Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan yang dibina	100%	71,283,800	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		Persentase Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan yang dibina	100%	63,177,800	
			Persentase jumlah desa ramah perempuan dan peduli anak	76%				Persentase jumlah desa ramah perempuan dan peduli anak	76%		
			Jumlah desa yang memiliki RBRA	71%				Jumlah desa yang memiliki RBRA	71%		
			Jumlah desa yang memiliki Pusat Kreatifitas anak	71%				Jumlah desa yang memiliki Pusat Kreatifitas anak	71%		
			Jumlah desa yang memiliki Rumah Curhat aktif	76%				Jumlah desa yang memiliki Rumah Curhat aktif	76%		
			Jumlah desa yang memiliki regulasi stop perkawinan anak	81%				Jumlah desa yang memiliki regulasi stop perkawinan anak	81%		
			Jumlah desa yang memiliki regulasi terkait pencegahan anak putus sekolah	81%				Jumlah desa yang memiliki regulasi terkait pencegahan anak putus sekolah	81%		

10.1	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang diselenggarakan	5 lembaga	71,283,800	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang diselenggarakan	5 lembaga	63,177,800	
IV	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN & KETERTIBAN UMUM		Persentase Penyelesaian Konflik di Kecamatan yang difasilitasi	100%	83,478,826	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN & KETERTIBAN UMUM		Persentase Penyelesaian Konflik di Kecamatan yang difasilitasi	100%	73,654,600	
11	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman & Ketertiban Umum		Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Trantibum	12 bulan	68,189,976	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman & Ketertiban Umum		Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Trantibum	12 bulan	66,221,600	
11.1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara RI, TNI & Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 laporan	48,842,400	Sinergitas dengan Kepolisian Negara RI, TNI & Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 laporan	48,780,000	
11.2	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat		Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	4 laporan	19,347,576	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat		Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	4 laporan	17,441,600	
12	Koordinasi Penerapan & Penegakan Peraturan Daerah & Peraturan Kepala Daerah		Prosentase Pelanggaran yang tertangani	100%	15,288,850	Koordinasi Penerapan & Penegakan Peraturan Daerah & Peraturan Kepala Daerah		Prosentase Pelanggaran yang tertangani	100%	7,433,000	

12.1	Koordinasi / Sinergi dgn Perangkat Daerah yg Tugas & Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara RI		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi i dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	8 laporan	15,288,850	Koordinasi / Sinergi dgn Perangkat Daerah yg Tugas & Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara RI		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	8 laporan	7,433,000	
V	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		Persentase APBDes yang ditetapkan tepat waktu	100%	68,537,500	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		Persentase APBDes yang ditetapkan tepat waktu	100%	66,827,500	
14	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Jumlah Desa yang difasilitasi penyelenggaraan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	21 desa	68,537,500	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Jumlah Desa yang difasilitasi penyelenggaraan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	21 desa	66,827,500	
14.1	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	21 Dokumen	4,320,000	Fasilitasi penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	21 Dokumen	2,610,000	

14.2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	21 Dokumen	23,890,500	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	21 Dokumen	23,890,500	
14.3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	21 Dokumen	3,060,000	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa & Pendayagunaan Aset Desa		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	21 Dokumen	3,060,000	
14.4	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa		Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	6 Dokumen	37,267,000	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa & Perangkat Desa		Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	6 Dokumen	37,267,000	

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Perencanaan program dan kegiatan Kecamatan Sidayu Tahun 2025 mengacu pada arah kebijakan Pemerintah Kabupaten Gresik Tahun 2025 dan disesuaikan dengan jumlah dana/ anggaran yang sudah ditetapkan pagu indikatifnya oleh Bappeda Kabupaten Gresik.

Perubahan Rencana Kerja dan pendanaan Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik Tahun 2025 seperti dalam tabel 4.1. sebagai berikut :



Tabel 4.1
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
KECAMATAN SIDAYU TAHUN 2025

NO.	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU/RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7	UNSUR KEWILAYAHAN														
	7.01	KECAMATAN						5,047,390,561.51							5,520,507,587.51	
I	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN	Persentase ketercapaian sasaran program OPD	100%	100%	100%	100%	4,758,859,661.51	Kec. Sidayu		-	Penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, efektif dan anti korupsi		100%	4,871,671,025.51	Kec. Sidayu
1	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi	13 Dok.	13 dokumen / laporan	13 dokumen / laporan	13 Dok.	6,749,000				Seluruh Pegawai di Lingkungan Kec. Sidayu	4 dok.	10,000,000		
1.1	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah buku rencana kerja SKPD	2 Dok.	1 Dok.	1 Dok.	1 Dok.	1,349,800		PAD		Penguatan Reformasi Birokrasi		1 Dok.	2,000,000	
1.2	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA	1 Dok.	1 Dok.	1 Dok.	1 Dok.	1,349,800		PAD		didukung pelayanan publik		1 Dok.	2,000,000	
1.3	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen DPA SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD	1 Dok.	1 Dok.	1 Dok.	1 Dok.	1,349,800		PAD		inklusif dan responsif		1 Dok.	2,000,000	
1.4	7.01.01.2.01.0005	Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD	1 Dok.	-	1 Dok.	1 Dok.	1,349,800		PAD		gender serta pengembangan Smart		1 Dok.	2,000,000	
1.5	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi & Penyusunan Laporan Capaian Kinerja & Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	Jumlah tersusunya laporan kinerja dan ikhtisar realisasi	12 Lap.	12 Lap.	12 Lap.	12 Lap.	1,349,800		PAD				12 Lap.	2,000,000	
2	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan Kinerja dan Adminmistrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	4,279,565,493.51					Seluruh Pegawai di Lingkungan Kec. Sidayu	12 bulan	4,282,215,693.51	
2.1	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah ASN yg menerima gaji & tunjangan	24 org / bln	24 orang	25 orang	25 orang	4,278,215,693.51		DAU				24 orang/ Bln	4,278,215,693.51	

2.2	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan/Buku Keuangan Akhir Tahun	1 Lap.	1 Lap.	1 Lap.	1 Lap.	1,349,800		PAD				1 Lap.	2,000,000	
2.3	7.01.01.2.02.0006	Koordinasi dan penyusunan laporan Keuangan Bulanan, Triwulan, Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	18 Lap.	-	-		-		PAD				18 Lap.	2,000,000	
3	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Peserta Pembinaan Administrasi Sumberdaya Aparatur di Kecamatan	31 orang	35 orang	32 orang	25 orang	5,917,000					Karyawan/ Karyawati Kec. Sidayu	31 orang	21,900,000	
3.1	7.01.01.2.05.0009	Pendidikan & Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas & Fungsi	Jumlah peserta yang mengikuti pembinaan	31 orang	35 orang	32 orang	25 orang	5,917,000		PAD				31 Orang	21,900,000	
4	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah fasilitasi terhadap pelaksanaan Tupoksi Perangkat Daerah	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	78,315,700					Karyawan/ Karyawati Kec. Sidayu	12 bulan	126,790,000	
4.1	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan komponen instalansi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	5,124,900		PAD				1 Paket	5,150,000	
4.2	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 paket	8 paket	8 paket	6 paket	22,584,200		PAD				8 Paket	22,730,000	
4.3	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	19 paket	19 paket	19 paket	2 paket	3,353,500		PAD				19 Paket	3,370,000	
4.4	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 paket	4 paket	4 paket	3 paket	4,121,400		PAD				4 Paket	5,980,000	
4.5	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Perundang Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dok.	12 Dok.	12 Dok.	5 Dok.	916,000		PAD				12 Dok.	1,860,000	

4.6	7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 paket	-	1 paket	1 paket	2,989,000							-	
4.7	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	12 lap.	12 lap.	12 lap.	12 lap.	14,231,500		PAD				12 lap.	62,400,000	
4.8	7.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem PBE pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada	-	-	5 dok.	1 dok.	24,995,200		PAD				5 dok.	25,300,000	
6	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah daerah	Jumlah fasilitasi terhadap pelaksanaan Tupoksi Perangkat Daerah	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	338,802,900					Karyawan/ Karyawati Kec. Sidayu	24 laporan	343,965,332	
6.1	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang	12 Lap.	12 Lap.	12 Lap.	12 Lap.	42,656,400		PAD				12 Lap.	46,308,832	
6.2	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Lap.	12 Lap.	12 Lap.	12 Lap.	296,146,500		PAD				12 Lap.	297,656,500	
7	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah fasilitasi Pemeliharaan terhadap sarana prasarana	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	49,509,568					Karyawan/ Karyawati Kec. Sidayu	12 bulan	86,800,000	
			Ketersediaan parkir kendaraan penyandang disabilitas	1 unit												
7.1	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan & Mesin Lainnya	Jumlah pemeliharaan peralatan & mesin yg dilaksanakan	6 unit	6 unit	5 Unit	5 Unit	30,971,200		PAD				6 Unit	36,000,000	
7.2	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor & Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan gedung kantor dan bangunan lainnya	3 unit	3 unit	3 unit	3 unit	13,868,368		PAD				3 unit	31,300,000	

[illegible]

9	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah pelaksanaan koordinasi pemberdayaan desa	28 Keg	100%	28 Keg	28 Keg	81,675,700					Perangkat Desa, Tokoh Masyarakat, Lembaga Kemasyarakatan Desa, Lembaga / Pelaku Perakonomian Desa, Kelompok Perempuan dan Forum Anak-anak	28 Keg	119,306,000	
			Persentase perwakilan kelompok perempuan dan forum anak di Musrenbang	100%	100%	100%	100%							100%		
			Persentase desa yang memasukkan usulan perempuan dalam hasil Musrenbang Desa	100%	100%	100%	100%							100%		
9.1	7.01.03.2.01.0001	Penigkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di	7 lembaga Kemasyar akatan	7 lembaga	7 lembaga	7 lembaga	51,096,400		PAD				7 lembaga	56,510,900	
9.2	7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	21 Dok.	21 Dok.	21 Dok.	21 Dok.	12,693,700		PAD				21 Dok.	15,795,100	
9.3	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah	23 Lap.	23 Lap.	23 Lap.	3 Lap.	17,885,600		PAD				23 Lap.	47,000,000	

10	7.01.04.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan yang aktif	100%		100%	100%	63,177,800					Karang Taruna, PKK, UKS dan Lembaga Kemasyarakatan Desa	100%	261,838,088	
			Persentase jumlah desa ramah perempuan dan peduli anak	86%		76%	76%							86%		
			Persentase desa yang memiliki RRRRA	81%		71%	71%							81%		
			Persentase desa yang memiliki Pusat Kreatifitas anak	81%		71%	71%							81%		
			Persentase desa yang memiliki Rumah Curhat aktif	86%		76%	76%							86%		
			Persentase desa yang memiliki regulasi stop perkawinan anak	90%		81%	81%							90%		
			Persentase desa yang memiliki regulasi terkait pencegahan anak putus sekolah	90%		81%	81%							90%		
10.1	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang dilaksanakan	5 lembaga	5 lembaga	5 lembaga	5 lembaga	63,177,800		PAD				5 lembaga	261,838,088	
IV	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN & KETERTIBAN UMUM	Persentase Penyelesaian Konflik di Kecamatan yang difasilitasi	100%	100%	100%	100%	73,654,600						100%	152,463,350	
11	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman & Ketertiban Umum	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Trantibum	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	66,221,600					Satlinmas Desa, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan Masyarakat	12 bulan	119,536,000	

11.1	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara RI, TNI & Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Lap.	12 Lap.	12 Lap.	12 Lap.	48,780,000		PAD				12 Lap.	100,186,000	
11.2	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	4 Lap.	4 Lap.	4 Lap.	2 Lap.	17,441,600		PAD				4 Lap.	19,350,000	
12	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan & Penegakan Peraturan Daerah & Peraturan Kepala Daerah	Persentase Pelanggaran yang tertangani	100%	100%	100%	100%	7,433,000					Masyarakat umum	100%	32,927,350	
12.1	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi / Sinergi dgn Perangkat Daerah yg Tugas & Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara RI	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	8 Lap.	8 Lap.	8 Lap.	2 Lap.	7,433,000		PAD				8 Lap.	32,927,350	
V		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN LULU LUM	Persentase Penugasan Kepala Daerah yang difasilitasi	100%	-	-	-	-						100%	7,500,000	
13		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah kewenangan/penugasan yang di laksanakan	1 keg	-	-	-	-					Masyarakat umum dan 21 desa	1 keg	7,500,000	

13.1		Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan	96 Orang	-	-	-	-						96 Org	7,500,000	
VI	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase APBDes yang ditetapkan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	66,827,500						21 desa	96,305,770	
14	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang difasilitasi penyelenggaraan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan	21 desa	21 desa	21 desa	21 desa	66,827,500					Pemerintahan Desa	21 desa	96,305,770	
14.1	7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan	21 Dok.	21 Dok.	21 Dok.	21 Dok.	2,610,000		PAD				21 Dok.	13,684,000	
14.2	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	21 Dok.	21 Dok.	21 Dok.	21 Dok.	23,890,500		PAD				21 Dok.	24,012,000	
14.3	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan	21 Dok.	21 Dok.	21 Dok.	21 Dok.	3,060,000		PAD				21 Dok.	11,150,000	

14.4	7.01.06.2.01.0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat	6 Dok.	4 dokumen	4 dokumen	6 Dok.	37,267,000		PAD				6 Dok.	34,383,300	
14.5	7.01.06.2.01.	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan							PAD				21 Dok.	13,076,470	

BAB IV

P E N U T U P

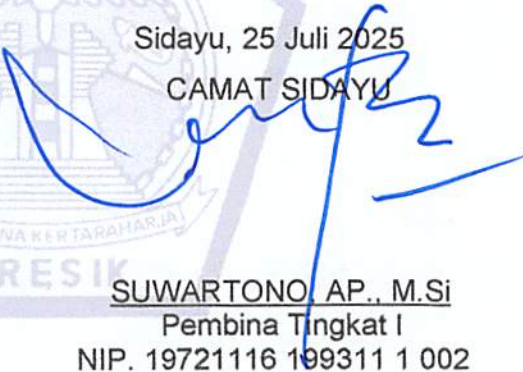
Sebagai uraian akhir pada Bab Penutup Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik Tahun 2025 ini, disampaikan kaidah pelaksanaan Renja dengan rincian sebagai berikut :

1. Sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka dengan ini ditetapkan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Tahun 2025 sebagai penjabaran Rencana Strategis Kecamatan Sidayu Tahun 2021 - 2026 selanjutnya akan dijadikan dasar untuk menyusun Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Kecamatan Sidayu tahun 2025.
2. Dengan ditetapkan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan tahun 2025 ini maka semua pihak dan pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan untuk dijadikan pedoman dalam operasionalisasi peran masing-masing dalam pelaksanaan program kegiatan tahunan
3. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Sidayu tahun 2025 ini akan dijadikan dasar pengukuran dan evaluasi kinerja Aparatur Kecamatan sekaligus sebagai dasar pembuatan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKJIP) Tahun 2025.
4. Diharapkan dengan tersusunnya Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Sidayu tahun 2025 ini dapat menjadi pedoman Aparatur Pemerintah Kecamatan di dalam melaksanakan program kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

5. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Sidayu Tahun 2025 ini akan dijadikan dasar pengukuran dan evaluasi kinerja secara kumulatif tahun 2025 dan sekaligus sebagai dasar laporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi tahun 2025 ;
6. Diharapkan dengan tersusunnya Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Sidayu Tahun 2025 ini dapat dibangun komitmen bersama dari seluruh jajaran organisasi untuk taat asas dalam perencanaan kinerja tahun 2025 dan dapat dihindari adanya RKA-SKPD yang keluar dari kesepakatan dalam Renja.



Sidayu, 25 Juli 2025
CAMAT SIDAYU


SUWARTONO AP., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19721116 199311 1 002